

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Basis Kas

Basis kas (cash basis) adalah metode pencatatan transaksi keuangan di mana pendapatan dan beban diakui hanya ketika kas benar-benar diterima atau dibayarkan. Dengan kata lain, transaksi non-kas seperti piutang, utang, penyusutan, atau kewajiban yang belum dibayar tidak dicatat dalam catatan laporan keuangan (Halim & Kusufi dalam repository STIE-MCE) .

Metode ini cenderung sederhana dan mudah diterapkan, sehingga banyak pemerintah daerah awalnya menggunakan basis kas sebagai pondasi sistem akuntansi mereka.

Dalam konteks pemerintahan, basis kas sering digunakan untuk laporan realisasi anggaran (LRA). Karena sifatnya yang mencerminkan aliran kas aktual, basis kas memudahkan evaluasi realisasi anggaran terhadap rencana anggaran, terutama untuk pengambilan keputusan operasional dan pengendalian kas. Namun, basis kas memiliki kelemahan signifikan: ia tidak mencerminkan kewajiban atau hak yang belum terealisasi. Artinya, pemerintah bisa tampak “baik” dalam kas, tetapi menyembunyikan beban masa depan atau kewajiban yang sudah timbul secara akrual.

Di sektor publik, transisi dari basis kas ke akrual sering dijustifikasi karena basis kas dianggap kurang memadai untuk menyajikan gambaran keuangan yang komprehensif. Penelitian dalam konteks akuntansi pemerintahan di Indonesia menyebut bahwa sistem basis kas “tidak lagi memuaskan” terutama karena tidak bisa menangkap aspek-aspek non-kas seperti penyusutan aset atau utang jangka panjang (analisis akuntansi sektor publik)

Secara pragmatis, dalam laporan realisasi anggaran Kota Malang, penggunaan basis kas terlihat dari pengakuan pendapatan dan belanja ketika kas benar-benar masuk atau keluar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah sudah bergerak ke akrual, elemen anggaran tetap mempertahankan penggunaan kas sebagai dasar pencatatan.

2.1.2 Basis Akrual

Penerapan basis akrual dalam akuntansi pemerintahan Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dengan basis ini, pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya transaksi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Basis akrual memungkinkan catatan keuangan yang lebih lengkap dan menyeluruh, karena bukan hanya transaksi kas yang dicatat, tetapi juga kewajiban dan hak yang belum terealisasi (Halim & Kusufi) Namun, implementasi di daerah menghadapi tantangan signifikan, seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memahami akuntansi berbasis akrual, sistem informasi

keuangan yang belum optimal, serta infrastruktur dan budaya kerja birokrasi yang belum sepenuhnya siap menerima perubahan sistem akuntansi tersebut (Rosyid, A., Maimanah, S.R., & Dewi, F, 2024). Hambatan ini seringkali berujung pada ketidaksesuaian pencatatan, keterlambatan pelaporan, dan lemahnya akurasi data keuangan pemerintah daerah.

Menurut IMF dalam publikasinya tentang penerapan akrual di sektor publik, basis akrual menyajikan informasi posisi dan kinerja keuangan yang lebih relevan dibanding basis kas, karena dapat mencerminkan semua sumber daya dan kewajiban pemerintah (Implementing Accrual Accounting) IMF. Basis akrual juga sering dikaitkan dengan reformasi keuangan publik dan penguatan manajemen fiskal di banyak negara yang menerapkan “New Public Management” (NPM), di mana akuntabilitas dan transparansi menjadi elemen penting (artikel Penerapan Accrual Accounting dalam sektor publik).

Dalam praktik penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia, akrual tidak langsung diterapkan penuh. Banyak daerah mengadopsi transisi atau sistem campuran (cash toward accrual) di mana LRA masih berbasis kas, sedangkan Neraca, Catatan keuangan, dan laporan operasional sudah berbasis akrual ini mencerminkan tahap implementasi bertahap (progressive adoption) (artikel Perkembangan Akuntansi Berbasis Akrual). Selain itu, transformasi penuh ke akrual memerlukan kesiapan sistem informasi, adaptasi SDM, dan perubahan budaya akuntansi (Studi strategi implementasi akrual)

2.1.3 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 memberikan kerangka regulasi yang jelas bagi pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal: beberapa aspek seperti pengakuan aset tetap, sistem informasi keuangan, dan kapasitas sumber daya manusia masih menjadi kendala utama (Mutia & Segarawasesa, 2022; Uzma, Aswat, & Dosinta, 2025). Sebagai contoh, studi di Kabupaten Kulon Progo menemukan bahwa meskipun Dinas Kesehatan telah mulai menerapkan SAP akrual sesuai regulasi, integrasi sistem aset dan pelaporan kewajiban belum memadai sehingga kualitas laporan keuangan belum maksimal. Demikian juga, penelitian pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat mencatat bahwa kendala teknis dan pemahaman akuntansi akrual masih menjadi penghambat signifikan, yang memerlukan intervensi seperti pelatihan dan peningkatan sistem informasi (Uzma et al., 2025). Dengan demikian, penerapan SAP dapat dikatakan berhasil pada level formal/regulatif, tetapi untuk mencapai penyajian laporan keuangan yang sepenuhnya sesuai akrual, dibutuhkan perbaikan dalam praktik pencatatan, monitoring, dan dukungan institusional.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual merupakan langkah strategis dalam reformasi keuangan publik di Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk menyajikan informasi keuangan pemerintah yang lebih komprehensif, transparan, dan akuntabel sehingga dapat

digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Dalam SAP berbasis akrual, pendapatan diakui saat hak atas pendapatan timbul dan beban diakui pada saat kewajiban terjadi, tidak semata-mata ketika kas diterima atau dibayarkan. Hal ini berbeda dengan sistem basis kas yang hanya mencatat transaksi berdasarkan arus kas masuk dan keluar. Menurut Rosana dan Bharata (2022), penerapan SAP berbasis akrual membantu memperbaiki kualitas laporan keuangan karena mampu menggambarkan posisi keuangan pemerintah secara lebih realistis. Namun, mereka juga menegaskan bahwa implementasinya tidak selalu berjalan mulus, karena banyak pemerintah daerah yang masih berada dalam tahap penyesuaian dari basis kas menuju akrual. Temuan serupa dikemukakan oleh Okfitasari (2019) yang menyatakan bahwa transisi menuju akrual di tingkat daerah seringkali dihadapkan pada kendala teknis dan adaptasi aparatur terhadap perubahan sistem akuntansi.

Lebih lanjut, penerapan SAP juga berperan penting dalam mendukung prinsip good governance, terutama pada aspek akuntabilitas dan transparansi publik. Dengan adanya SAP berbasis akrual, laporan keuangan pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban, tetapi juga menjadi sarana pengawasan publik terhadap penggunaan dana negara. Dalam konteks ini, Uzma, Aswat, dan Dosinta (2025) menemukan bahwa penerapan SAP berbasis akrual pada instansi pemerintah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, karena informasi keuangan yang dihasilkan lebih terbuka dan mudah diakses. Namun demikian, penelitian

oleh Mutia dan Segarawasesa (2022) menegaskan bahwa keberhasilan penerapan SAP sangat dipengaruhi oleh faktor internal, seperti kualitas sumber daya manusia, komitmen pimpinan, serta efektivitas sistem informasi keuangan daerah. Oleh karena itu, untuk mencapai penerapan SAP yang ideal, dibutuhkan dukungan penuh dari seluruh elemen pemerintah daerah — mulai dari peningkatan kompetensi aparatur, pembenahan sistem pelaporan keuangan, hingga pengawasan yang berkelanjutan terhadap kesesuaian pelaksanaan akuntansi dengan prinsip akrual sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010.

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, laporan keuangan pemerintah terdiri atas empat komponen utama yang saling melengkapi, yaitu:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA disusun berdasarkan basis kas, yaitu mencatat pendapatan dan belanja ketika kas diterima atau dibayarkan. Laporan ini menunjukkan realisasi pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan, sehingga menjadi alat kontrol terhadap efektivitas pelaksanaan APBD. Menurut Mahmudi (2022), LRA memberikan gambaran tentang kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sesuai rencana, serta menjadi ukuran efisiensi fiskal.

b. Neraca

Neraca disusun berdasarkan basis akrual, yang menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah pada akhir periode pelaporan. Neraca berfungsi untuk menunjukkan posisi keuangan pemerintah

daerah dan kemampuan entitas dalam memenuhi kewajibannya. Penelitian Mutia dan Segarawasesa (2022) menjelaskan bahwa penerapan akrual pada penyajian neraca memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi seluruh sumber daya ekonomi dan kewajiban secara lebih akurat.

c. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan ini menunjukkan arus masuk dan keluar kas selama satu periode akuntansi yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan. Laporan Arus Kas tetap menggunakan basis kas, sehingga berfungsi untuk menunjukkan kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas untuk mendanai kegiatan pemerintahan.

d. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK berfungsi untuk memberikan penjelasan rinci terkait kebijakan akuntansi, dasar pengukuran, serta informasi tambahan atas pos-pos dalam laporan keuangan. Dalam konteks SAP berbasis akrual, CaLK menjadi sarana penting untuk menjelaskan penerapan basis akrual, pengakuan aset tetap, dan kebijakan pengukuran kewajiban. Okfitasari (2019) menegaskan bahwa CaLK memainkan peran strategis dalam meningkatkan transparansi karena memuat uraian yang tidak tercantum secara eksplisit dalam laporan utama.

2.1.4 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berfungsi sebagai medium penting untuk menyajikan posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, serta kewajiban dan aset pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. Menurut penelitian Made Putri Ardia Garini & Ni Made Adi Erawati (2022),

kompetensi sumber daya manusia (human resource competence), sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan penerapan SAP berbasis akrual memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Bangli. Dengan demikian, tidak cukup hanya regulasi formal, tetapi juga diperlukan kesiapan aparatur dan sarana pendukung agar laporan keuangan yang disajikan memiliki kualitas: relevan, dapat dipercaya, lengkap, dan tepat waktu.

Beberapa studi juga menunjukkan bahwa penerapan SAP berbasis akrual secara formal meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sebagai contoh, penelitian oleh Budhi Purwantoro Jati (2019) menemukan bahwa setelah penerapan SAP berbasis akrual, terjadi peningkatan opini audit BPK atas LKPD, yang merupakan indikator langsung dari peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Di sisi lain, Lina Rosana & Risma Wira Bharata (2023) menyimpulkan bahwa SAP sangat mempengaruhi kualitas penyajian laporan keuangan, tapi belum sepenuhnya diterapkan dalam semua aspek, karena ada kendala seperti kesiapan SDM, tata kelola, dan sistem pendukung lain. Hal ini menunjukkan bahwa walau regulasi dan standar ada, implementasi di lapangan masih menunjukkan gap antara teori dan praktik.

Dalam konteks pemerintah daerah di Malang atau daerah-daerah serupa, aspek transparansi laporan keuangan dan aksesibilitas menjadi aspek kritis. Penelitian di Kabupaten Malang pada BKAD menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan sistem pengendalian intern signifikan

mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah. Kualitas laporan keuangan tidak hanya tergantung pada seberapa baik SAP diimplementasikan secara teknis (pengakuan aset, kewajiban, penyajian neraca) tetapi juga bagaimana laporan tersebut dapat diakses dan dipahami oleh publik, serta bagaimana opini audit memberikan feedback atas pelaksanaan SAP. Kondisi ini menuntut bahwa pemerintah daerah harus menyiapkan faktor internal seperti SDM ahli, sistem informasi keuangan yang terintegrasi, dan regulasi pelaksana lokal yang konkret agar LKPD yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun suatu penelitian, penting untuk mengkaji berbagai studi yang telah dilakukan sebelumnya guna mengetahui sejauh mana topik yang diteliti telah dibahas dan dikembangkan. Penelitian-penelitian terdahulu ini menjadi landasan awal untuk memahami konteks, variabel, serta metode yang telah digunakan oleh peneliti lain. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya membantu dalam merumuskan kerangka berpikir, tetapi juga memperkuat posisi dan kontribusi penelitian yang dilakukan saat ini.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan / Perbedaan
1	Salsabilla, dkk (2025)	Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Dalam Laporan Keuangan Pemerintah: Studi Tinjauan Literatur	Penerapan akuntansi berbasis akrual dinilai dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui pengakuan pendapatan	Persamaan: Sama-sama membahas penerapan akuntansi berbasis akrual dalam laporan keuangan pemerintah dan menekankan dampaknya terhadap

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan / Perbedaan
			dan beban pada saat terjadinya, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Namun, efektivitas penerapan ini sangat bergantung pada kompetensi SDM yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. pencatatan metode akuntansi dengan basis akrual dapat meningkatkan kualitas dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah karena dapat memprediksi masa depan yang mencerminkan realitas ekonomi.	transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Perbedaan: Penelitian Salsabilla bersifat literature review (kajian pustaka) tanpa objek daerah tertentu, sedangkan penelitian Anda bersifat studi kasus yang menganalisis langsung laporan keuangan Pemerintah Kota Malang untuk melihat sejauh mana penerapan basis kas dan akrual terjadi dalam praktik.
2	Zebua, dkk (2024)	Penyusunan Laporan Keuangan Desa dari Basis Kas Menuju Basis Akrual (Studi Kasus di Desa Muzoi Kecamatan Lahewa Timur).	Hasil PKM yang diperoleh yaitu Laporan Keuangan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa saat ini masih menggunakan basis kas dalam menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Sesuai dengan perkembangan zaman, Laporan Keuangan Desa diarahkan menggunakan basis akrual dalam menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan atas aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Salah satu tujuan Laporan keuangan Desa disusun yaitu dalam rangka menyajikan	Persamaan: Sama-sama menyoroti transisi sistem pencatatan dari basis kas menuju basis akrual, serta menekankan pentingnya penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Perbedaan: Fokus penelitian Zebua adalah pemerintah desa (tingkat mikro) dengan pendekatan kegiatan pengabdian masyarakat, sedangkan penelitian Anda berfokus pada pemerintah kota (entitas makro) dan bersifat analisis dokumen terhadap

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan / Perbedaan
			informasi realisasi anggaran dan posisi keuangan pemerintah desa yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi kebijakan/keputusan lalu dan merencanakan kebijakan di masa yang akan datang. Selain itu, laporan keuangan pemerintah desa sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) pemerintah desa atas sumber daya yang dikelola dan/atau dipercayakan kepada Pemerintah Desa.	LKPD.
3	Prayogo, dkk (2023)	Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua dalam Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah	Hasil penelitian menemukan bahwa: Implementasi penerapan PP No.71 Tahun 2010 tentang akuntansi berbasis akrual dan Peraturan Daerah tentang kebijakan akuntansi berbasis akrual dalam laporan keuangan Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menerapkan akuntansi berbasis akrual yang akuntabilitas, transparansi keuangan terhadap masyarakat (publik) yang memiliki hak dasar terhadap pemerintah, yaitu hak untuk mengetahui kebijakan pemerintah, mengetahui keputusan	Persamaan: Sama-sama meneliti penerapan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual, serta membahas akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan di sektor publik. Perbedaan: Objek penelitian Prayogo adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan fokus pada evaluasi implementasi kebijakan dan kendala SDM, sedangkan penelitian Anda fokus pada identifikasi elemen basis kas dan akrual dalam LKPD

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan / Perbedaan
			yang diambil pemerintah, mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu, hak untuk diberi informasi yang meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik, dan semua itu telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga non publik dengan media massa sebagai sarana arus informasi buat masyarakat. Kendala yang dihadapi dalam penerapan PP No.71 Tahun 2010 tentang akuntansi berbasis akrual dan Peraturan Daerah tentang kebijakan akuntansi berbasis akrual dalam laporan keuangan Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih minimnya sumber daya manusia yang profesional dalam mengelola keuangan, sehingga diperlukan pelatihan terhadap staf pengelola.	Pemerintah Kota Malang.
4	Halwa dan Nazah (2023)	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kinerja keuangan ditinjau dari rasio kemandirian keuangan pemerintah	Persamaan: Sama-sama membahas penerapan SAP berbasis akrual sesuai PP No. 71

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan / Perbedaan
		Akrual terhadap Kinerja Keuangan di Kantor Pemerintahan Kecamatan Medan Tuntungan	daerah dan rasio efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan setelah penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual. Namun kinerja keuangan ditinjau dari rasio efisiensi tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan setelah penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual.	Tahun 2010 dan dampaknya terhadap sistem pelaporan keuangan pemerintah daerah. Perbedaan: Halwa dan Nazah menilai kinerja keuangan dengan analisis rasio keuangan (kuantitatif), sementara penelitian Anda bersifat kualitatif deskriptif, menganalisis struktur dan kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip akrual.
5	Simanjutak, dkk (2023)	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar	Hasil analisisnya penelitian tentang laporan keuangan Dinas PUPR Kota Pematangsiantar yang berupa realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan yang di lakukan oleh Dinas PUPR Kota Pematangsiantar sudah sesuai dengan PP No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah namun sementara itu masih ada laporan keuangan yang belum di sajikan di laporan keuangan tahunan seperti laporan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas karena perlu di tambahkan agar	Persamaan: Sama-sama mengkaji penerapan SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan menilai kesesuaiannya dengan PP No. 71 Tahun 2010. Perbedaan: Simanjutak meneliti unit kerja spesifik (Dinas PUPR) dengan menilai kelengkapan komponen laporan keuangan, sedangkan penelitian Anda menganalisis keseluruhan LKPD Pemerintah Kota Malang, menitikberatkan pada pembedaan antara

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan / Perbedaan
			lengkap dan sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010.	basis kas dan akrual di setiap komponen laporan.
6	Rosana dan Bharata (2023)	Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan	Penelitian ini memberikan kesimpulan subjektif mengenai implementasi SAP berbasis akrual pada laporan keuangan dari peneliti terdahulu, yang membuktikan bahwa SAP sangat mempengaruhi kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah. Namun untuk penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 mengenai SAP berbasis akrual belum sepenuhnya diterapkan dalam proses penyajian laporan keuangan, baik itu di pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Karena terdapat beberapa kendala seperti kesiapan SDM, tata Kelola pemerintahan, dan kendala lainnya. Namun tetap terdapat strategi tertentu untuk mengatasi kendala Tersebut.	Persamaan: Sama-sama menyoroti pengaruh penerapan SAP berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan dan kendala implementasinya seperti keterbatasan SDM dan tata kelola. Perbedaan: Penelitian Rosana dan Bharata bersifat evaluatif dan general terhadap implementasi SAP di berbagai instansi, sedangkan penelitian Anda lebih spesifik pada satu entitas pemerintah daerah (Kota Malang) dengan analisis isi laporan keuangan (document analysis).
7	Jati (2019)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil analisis menunjukkan bahwa secara signifikan penerapan SAP Berbasis Akrual berpengaruh terhadap kualitas LKPD. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan terjadinya peningkatan kualitas LKPD setelah penerapan SAP Berbasis Akrual. Hal ini dibuktikan dengan signifikannya beta penerapan SAP Berbasis Akrual	Persamaan: Sama-sama membahas hubungan penerapan SAP berbasis akrual dengan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Perbedaan: Jati menggunakan pendekatan kuantitatif (uji pengaruh dan opini BPK), sementara

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan / Perbedaan
			dan meningkatnya rata-rata Opini BPK sebagai proksi dari kualitas LKPD setelah penerapan SAP Berbasis Akrua.	penelitian Anda tidak mengukur pengaruh, tetapi mendeskripsikan penerapan basis kas dan akrual secara kualitatif pada laporan keuangan Kota Malang.
8.	Ferlia, dkk (2023)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada BKAD Kabupaten Malang)	Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan SPIP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Secara parsial akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, transparansi tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, SPIP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.	Persamaan: Sama-sama dilakukan di wilayah Malang dan menyoroti faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan daerah, khususnya akuntabilitas dan transparansi. Perbedaan: Ferlia meneliti faktor-faktor penyebab kualitas laporan keuangan dengan pendekatan kuantitatif (uji statistik), sedangkan penelitian Anda menganalisis konten laporan keuangan untuk melihat penerapan basis kas dan akrual serta kesesuaiannya dengan SAP.

Sumber : Dikelola Peneliti (2025)